



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 04 Maret 2017

Halaman: 10

Calon Investor Peroleh Kepastian

UMBULHARJO, BERNAS -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memberikan kejelasan dan kepastian kepada calon investor atas pemanfaatan lahan di Kota Yogyakarta.

"Hal ini diatur Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029," kata Tri Widiyanto, Staf Ahli Walikota Bidang Umum, saat menerima kunjungan kerja DPRD Kota Bekasi, Jumat (3/3) kemarin, di Balaikota Yogyakarta.

Dalam Perda itu dijabarkan status kawasan, pemanfaatan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang. Sedangkan untuk

mendukung iklim investasi diperlukan penyederhanaan prosedur perizinan, kejelasan untuk persyaratan perizinan dan waktu penyelesaian maksimal di Dinas Perizinan.

Menurut dia, sebagai upaya menarik investor ke Yogyakarta, Pemkot membentuk Kliper (Klinik Perizinan). "Klinik ini akan membantu calon investor yang mengalami hambatan ketika akan mengajukan perizinan," jelasnya.

Pemkot Yogyakarta juga membentuk Gerai Investasi dan Advice Planning. "Keduanya adalah fasilitas layanan yang kami berikan kepada investor, tujuannya memberikan

kemudahan terkait peluang investasi di Kota Yogyakarta," tambahnya.

Di hadapan 16 orang anggota DPRD Bekasi, Tri Widiyanto lebih lanjut mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, instansi yang semula bernama Dinas Perizinan berganti menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

"Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk menjamin transparansi di bidang pelayanan perizinan, yang saat ini melaksanakan pemrosesan 27 jenis izin seperti HO, IMB, serta izin pene-

litian," kata dia.

Beberapa jenis izin dapat diakses secara online sehingga memudahkan masyarakat melihat sejauh mana izin telah diproses.

Pada bagian lain soal masalah pengelolaan aset, dia mengatakan Pemkot Yogyakarta beberapa waktu yang lalu

melantik Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (MP-TPTGR). Majelis ini diisi para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala daerah dan bertugas membantu kepala daerah menyelesaikan kerugian daerah. (*)



DPRD KOTA BEKASI -- Staf Ahli Walikota Bidang Umum, Tri Widiyanto, menerima kunjungan kerja DPRD Kota Bekasi, Jumat (3/3), di Balaikota Yogyakarta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005